



SEKILAS TENTANG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN SINTANG

- Kabupaten Sintang memiliki 1,3% dari total wilayah hutan Indonesia, termasuk biodiversitas yang terdapat di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya.
- Kawasan hutan (lindung dan produksi) mencakup 59% dari luas Kabupaten Sintang, namun kabupaten ini merupakan salah satu wilayah dengan tingkat degradasi, deforestasi, & kebakaran hutan tertinggi di Kalimantan Barat
- Perekonomian Sintang didominasi oleh sektor berbasis sumber daya alam dan lahan, terutama pertanian dan perkebunan, yang meningkatkan peluang terjadinya deforestasi dan degradasi hutan
- Komitmen Sintang sebagai Kabupaten Lestari diperkuat melalui Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) & Rencana Aksi Daerah Sintang Lestari (RAD-SL)
- Kabupaten Sintang memiliki beberapa forum multi-pemangku kepentingan (SekBer, FOKSBI) yang berupaya untuk membantu koordinasi para pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk menjalankan inisiatif berkelanjutan

PENYEBAB DEFORESTASI

- Pertanian skala besar (kepala sawit)
- Pertanian skala kecil (kelapa sawit & karet)
- Pemukiman yang tumpang tindih dengan kawasan hutan

EMISI TAHUNAN RATA-RATA DARI DEFORESTASI AREA

3,18 Mt CO₂ (2010-2019) termasuk bio massa permukaan tanah dan dekomposisi gambut

AREA 21.635 km²

POPULASI 418.785 (2019)

HDI 66,70 (2019)

PDB Rp 9.624.621,57 (2019, Tahun dasar 2010)

GINI 0,26 (2018)

KEGIATAN EKONOMI UTAMA

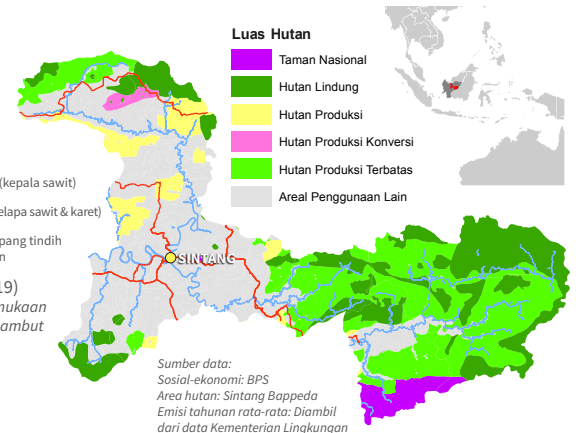
- Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan
- Perdagangan
- Konstruksi

POPULASI DESA/KOTA

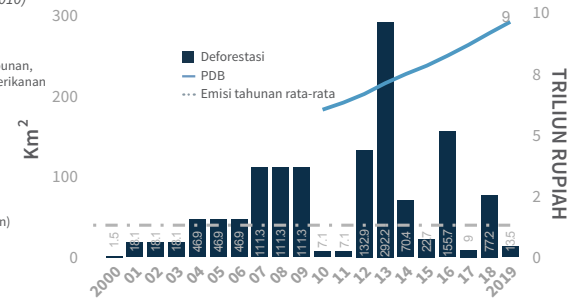
81,4%/18,6%

KOMODITAS STRATEGIS (PRODUKTIVITAS KABUPATEN, 2019)

- Kelapa sawit (280.771 ton)
- Karet (39.167 ton)
- Lada (901 ton)
- Kopi (99 ton)
- Kakao (10 ton)



Sumber data: Sosial-ekonomi: BPS
Area hutan: Sintang Bappeda
Emisi tahunan rata-rata: Diambil dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

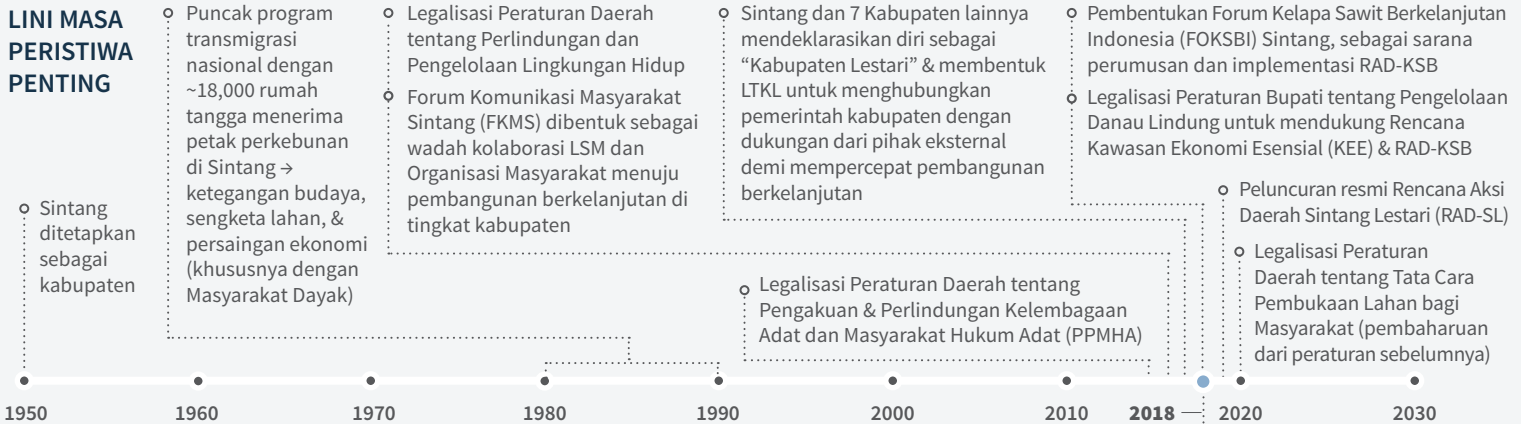


SOROTAN INOVASI

Dikonsep sejak tahun 2018, Sintang Lestari memiliki visi untuk mengoptimalkan manfaat sosial-ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian alam & lingkungan hidup. Didukung oleh Peraturan Bupati Sintang No. 66/2019, **Rencana Aksi Daerah Sintang Lestari (RAD-SL)** bertujuan untuk memfasilitasi transisi sistemik Kabupaten Sintang menuju pembangunan lestari & menjadi dasar bagi instansi pemerintah untuk melaksanakan kerja & rencana strategis. Perumusan RAD-SL melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan difasilitasi oleh Conservation Strategy Fund (CSF) Indonesia. RAD-SL memiliki tujuh misi yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) & menetapkan indikator kinerja, sasaran / target, & roadmap hingga tahun 2030. Sesuai dengan Strategi & Rencana Aksi REDD+ Kalimantan Barat (SRAP REDD+) & Kawasan Ekosistem

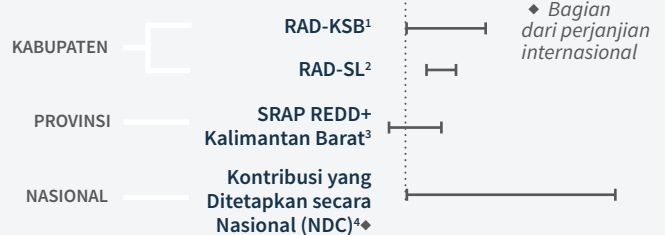
Esensial (KEE) Kalimantan Barat, Sintang berkomitmen untuk berkontribusi dalam mengurangi emisi GRK & melestarikan hutan dalam RAD-SL. Selain itu, forum multi-pemangku kepentingan (Sekretariat Bersama/ SekBer) yang melibatkan pemerintah, LSM /Organisasi Masyarakat, FKMS, Masyarakat Adat, Swasta & Perwakilan Koalisi lainnya telah dibentuk sebagai sistem tata kelola kelembagaan yang transparan untuk mendorong implementasi RAD-SL, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, & menjadi jembatan komunikasi antar pemangku kepentingan. RAD-SL (pertama di kabupaten LTKL) dapat digunakan sebagai model untuk kabupaten lain. Namun demikian, (meski menurun) pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) berbasis lahan & sumber daya alam tetap menjadi suatu tantangan dalam proses mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sintang.

LINI MASA PERISTIWA PENTING



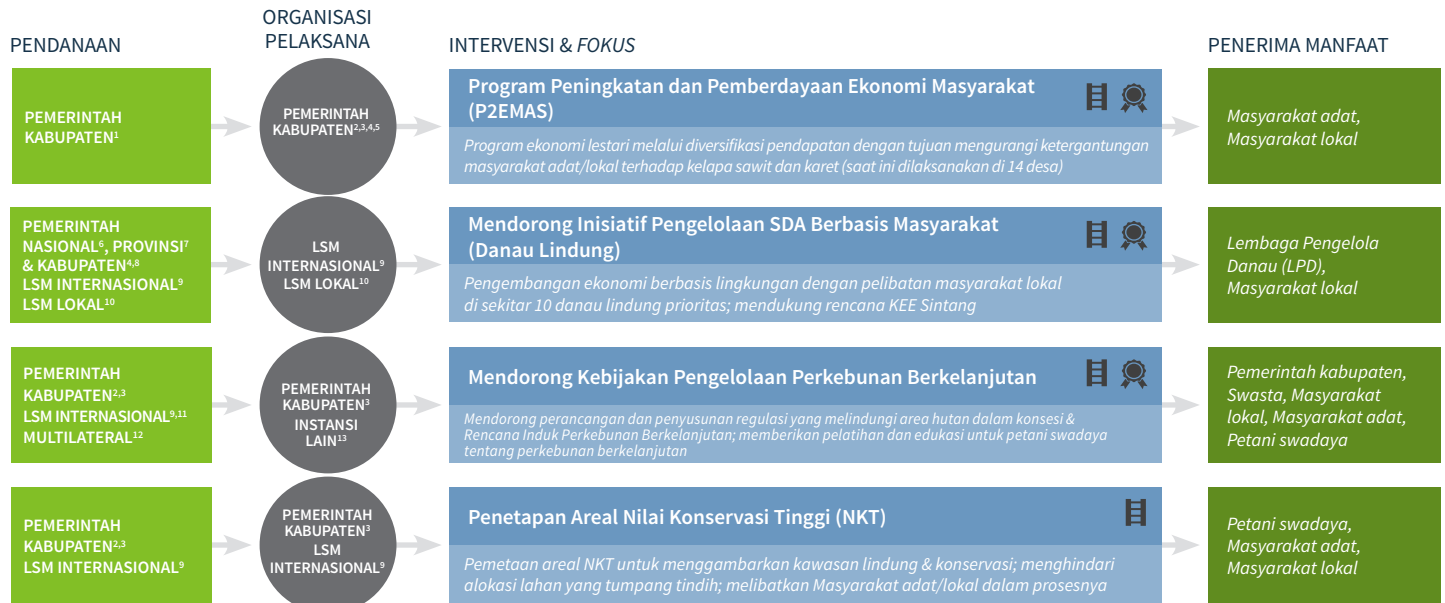
JANJI & KOMITMEN

1 Pengembangan kelapa sawit berkelanjutan untuk mencegah degradasi lingkungan, bersumber dari Rencana Aksi Nasional (RAN-KSB); meningkatkan kesejahteraan petani dan diversifikasi pendapatan setidaknya 30%; meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal agar mempunyai sertifikat di bidang kelapa sawit sebesar 20% per tahunnya; dan melaksanakan pelatihan praktik pertanian yang baik (Good Agricultural Practice/GAP) sebesar 20% per tahun. 2 Strategi transisi dari kondisi normal (Business as Usual/BAU) menuju pembangunan berkelanjutan; mempertahankan zonasi penggunaan lahan sebesar 59% untuk hutan lindung dan produksi, dengan total tutupan hutan setidaknya 75% dari total wilayah kabupaten; tidak ada izin baru untuk pembukaan lahan. 3 Penurunan emisi gas rumah kaca berbasis lahan sebesar 60% dari kondisi normal/BAU sebesar 58,7 Mton CO₂ (pembaharuan dari SRAP-REDD+ tahun 2013). 4 Kontribusi terhadap target nasional: penurunan emisi sebesar 29% (dengan upaya sendiri) sampai dengan 41% (jika mendapat dukungan internasional) di bawah tingkat BAU sebesar 2,869 Mton CO₂.



INTERVENTION UTAMA

✕ DISINSENTIF | 📅 LANGKAH-LANGKAH PEMUNGKIN | 🏆 INSENTIF



1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). 3 Dinas Pertanian dan Perkebunan. 4 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP). 5 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop). 6 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP). 7 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat (DKP). 8 Dinas Lingkungan Hidup (DLH). 9 WWF Indonesia. 10 Sintang Freshwater Care (SFC). 11 Rainforest Alliance. 12 UNDP-GEF. 13 Forum Komunikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FOKSBI) Sintang.

KEMAJUAN MENUJU KEBERLANJUTAN YURISDIKSIONAL

○ AWAL | ● MENENGAH | ● LANJUT

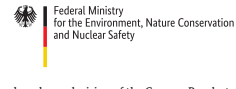
Strategi Pembangunan Berkelanjutan Terintegrasi	●	<ul style="list-style-type: none"> RAD-SL, sebuah pedoman untuk koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan pemangku kepentingan, sedang dalam proses integrasi dengan dokumen perencanaan lainnya (RPJMD, RTRW, KLHS) RAD-KSB & Rencana Induk Penanggulangan Bencana Kabupaten Sintang disusun sejalan dengan RAD-SL
Rencana Tata Ruang	●	<ul style="list-style-type: none"> Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah dicantumkan dalam RTRW Kabupaten, sudah melalui konsultasi publik, terintegrasi dengan Rencana Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), & selaras dengan RTRW, RPJMD, serta KLHS di level provinsi & nasional Keterlibatan masyarakat adat dan lokal dalam pemetaan Peta Tata Batas Desa
Target Kinerja	○	<ul style="list-style-type: none"> Target berkelanjutan yang dicantumkan dalam RAD-SL & RAD-KSB (termasuk konversi hutan), yang disepakati oleh para pemangku kepentingan terkait telah disesuaikan dengan target provinsi dan nasional Kabupaten telah menetapkan target untuk menurunkan tingkat pengangguran & kemiskinan, meningkatkan produktivitas UMKM, menarik investasi, serta meningkatkan kemudahan berusaha (EoDB)
Pemantauan, Pelaporan & Verifikasi (MRV)	○	<ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Sintang membuat laporan atas kemajuan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), RAN-KSB, serta kinerja pemerintah daerah (SAKIP) kepada pemerintah nasional Sistem pemantauan elektronik (e-planning, e-budgeting, dan e-procurement) dapat diakses oleh publik; pemantauan kawasan hutan sedang diintegrasikan ke dalam RTRW
Kebijakan & Insentif	●	<ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Sintang memiliki beberapa kebijakan dan regulasi yang memberikan insentif terhadap tata kelola lanskap berkelanjutan (KEE, RAD-KSB); sistem perencanaan/penganggaran untuk memastikan keselarasan insentif yang dikembangkan Kabupaten Sintang memiliki sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) untuk kemudahan perizinan, penghargaan dan keringanan pajak bagi perusahaan yang menunjukkan keterlaksanaan produk yang baik dan sistem produksi yang lestari, serta bantuan teknis/finansial terhadap UMKM dan BUMDes
Tata Kelola Multi-Pemangku Kepentingan	●	<ul style="list-style-type: none"> SekBer & FOKSBI Sintang (dipimpin & dikoordinasikan oleh pemerintah daerah, termasuk dinas pemerintahan, swasta, petani swadaya & LSM) mendukung dan mengawasi implementasi RAD-SL dan RAD-KSB. Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) Sintang bekerja sama dengan LSM dan Organisasi Masyarakat untuk mencapai target redistribusi tanah reforma agraria (TORA)
Pertanian Berkelanjutan	○	<ul style="list-style-type: none"> FOKSBI melalui RAD-KSB telah mendafta jumlah petani swadaya (104 petani), mengadakan pelatihan praktek pertanian yang baik di 5 Kecamatan, & membantu sertifikasi ISPO/RSPO (49 petani) Pemerintah Kabupaten bersama dengan LSM sedang mengembangkan rencana induk perkebunan yang terintegrasi dengan areal NKT
Hak Masyarakat Adat & Masyarakat Lokal	○	<ul style="list-style-type: none"> Tim Tugas Koordinasi Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten (TPK3K) bertugas untuk menyelesaikan konflik batas dan kepemilikan lahan antara perusahaan dengan masyarakat adat/lokal, namun metode penyelesaian dan koordinasi dengan organisasi masyarakat/pemerintah perlu diperkuat PPMHA mencakup tanggung jawab pemerintah kabupaten terhadap masyarakat adat dan pembiayaan/dukungan fasilitas terhadap kelembagaan masyarakat adat
Pendanaan Pembangunan Berkelanjutan	○	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi RAD-KSB dan RAD-SL sebagian besar didanai oleh APBD; pendanaan dari skema insentif pemerintah nasional dialokasikan untuk program spesifik (mis. Penanggulangan kebakaran hutan) Program kolaborasi dengan pihak eksternal (mis. Masterclass Investasi Lestari) bertujuan untuk menarik investor dan memfasilitasi kemitraan pemerintah dengan swasta (<i>Public-Private Partnership/PPP</i>)

SITASI | W. Sukri, B. Oktavianus, Anastasia, F. Parwadi, Y. Prawiyanto, A. Isnandar, E. Subariyanti, Hermanto, Firdaus, P. Epi, J. Perdana ZH, S. Susanti, H. Setiawan, S.C. Putri, S.J. Wihastuti, P.R. Pasarihu, R.P. Istanti, S. Peteru. 2020. "Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia" dalam C. Sticker et al. (Eds.), *Keadaan Keberlanjutan Yurisdiksional*. San Francisco, CA: EII; Bogor, Indonesia: CIFOR.

PENELAHAH | WWF Sintang, Rainforest Alliance, CSF Indonesia

REFERENSI DAN SUMBER DATA YANG LEBIH LENGKAP DAPAT DILIHAT DI www.earthinnovation.org/state-of-jurisdictional-sustainability 2020/10/14

TIM TEKNIK



based on a decision of the German Bundestag

TANTANGAN & PELUANG

TANTANGAN

- Belum ada upaya pemasaran yang memadai untuk peluang investasi dan potensi di Kabupaten Sintang
- Perlunya perbaikan komunikasi dan penyelarasan data antar pemangku kepentingan dan memastikan partisipasi/komitmen antar pemangku kepentingan (termasuk pelibatan masyarakat lokal) dalam pengelolaan lahan dan implementasi Roadmap Sintang Lestari
- Perlu ada upaya untuk menjaga keterlibatan pemuda dan upaya pengembangan kapasitas (keterampilan & pengetahuan) untuk masyarakat adat/lokal dalam pembangunan berkelanjutan
- Dukungan dari pemerintah pusat untuk daerah yang mengupayakan pembangunan berbasis lingkungan masih terbatas dan kurangnya insentif yang dapat diakses untuk kemajuan berkelanjutan

PELUANG

- Regulasi/rencana aksi daerah (RPJMD, RAD-SL, RAD-KSB, PPMHA) dan forum multi-pemangku kepentingan (FOKSBI, SekBer) memungkinkan adanya ruang untuk berkolaborasi & mencapai pembangunan berkelanjutan
- Banyak produk lokal (makanan hingga kerajinan tangan) dengan praktik produksi baik memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi produk unggulan
- Praktik perkebunan berkelanjutan dapat membuka akses kepada sertifikasi, insentif, dan Praktik Pertanian yang Baik (*Good Agricultural Practices/GAP*) dapat membantu meningkatkan hasil perkebunan